

BERGERAK DARI OTORITARIANISME ORDE BARU KE REFORMASI: KUASA NEGARA ATAS PENDIDIKAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF *IDEOLOGICAL STATE APPARATUS (ISA)* LOUIS ALTHUSSER

Radius Setiyawan, Agus Budiman
Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Muhammadiyah Surabaya
Universitas Muhammadiyah Surabaya
radiussetiyawan@gmail.com, boedieprakosa77@gmail.com

ABSTRAK

Orde baru selama 32 tahun telah menciptakan keseragaman dalam banyak aspek. Kekuasaan yang sentralistik dan pembangunan yang hanya berpusat di Jawa memunculkan problematika yang terus menerus berlangsung hingga masa saat ini : dikotomi pusat (core) dan pinggiran (periphery). Dunia pendidikan adalah salah satu aspek yang dijadikan sebagai alat kuasa negara atas rakyatnya. Ketika orde baru jatuh, ada upaya untuk keluar dari dominasi pendidikan yang sentralistik dan jawa-sentris. Melalui tulisan ini, penulis berfokus pada 2 (dua) hal. (1) Menjelaskan proses kuasa negara atas pendidikan melalui instrument ideologinya pada orde baru, dan (2) Gambaran pasca orde baru dan usaha keluar dari kuasanya. Kajian dalam tulisan ini berusaha menghimpun beberapa kajian yang terkait dengan peran negara dalam pendidikan dan menghubungkannya dengan perspektif Ideological State Apparatus (ISA) Louis Althusser. Dengan menggunakan metode kajian kepustakaan, kajian ini menjelaskan bagaimana dominasi orde baru yang cenderung jawa-sentris, bias gender dan sentralistik dipengaruhi dan dikontrol oleh oleh negara. Selain itu juga, temuannya lainnya adalah adanya upaya keluar dari dominasi orde baru, akan tetapi secara substansial belum banyak beranjak darinya

Kata kunci : Ideologi state apparatus (ISA), Kuasa negara, Pendidikan, Orde baru.

ABSTRACT

A new order over the past 32 years had created uniformity in many aspects. The centralistic power and the development that were only centered in Java that had risen to problems that continue to last until the present time: central dichotomy (core) and periphery. The world of education was one aspect that was used as a tool of state power over its people. When the new order fall, there was an attempt to get out of the dominance of centralistic and Javanese-centric education. Through this paper, the researcher focuses on 2 (two) things. Those were (1) Explain the process of state power over education through ideological instruments in the new order, and (2) Post-new order description and efforts to get out of power. The research in this paper seeks to compile several studies related to the role of the state in education and link it to the perspective of Ideological State Apparatus (ISA) by Louis Althusser. Using the literature study method, this research explained how the dominance of the new order that tends to be Javanese-centric, gender-biased and centralistic were influenced and controlled by the state. In addition, the other finding was an attempt to get out of the dominance of the new order, but substantially has not moved much from it.

Keywords : Ideology State Apparatus (ISA), State Power, Education, New Order.

PENDAHULUAN

Era reformasi bagi Indonesia merupakan peluang untuk keluar dari bayang-

bayang identitas ke-Indonesia-an yang tunggal. Orde baru selama 32 tahun telah menciptakan keseragaman dalam

banyak aspek. Salah satunya dalam dunia pendidikan. Periode orde baru (1968-1998) dunia pendidikan nasional mengenal empat kurikulum, yakni kurikulum 1968, 1975, 1984, dan 1994. Kurikulum 1968 disebut-sebut sebagai yang paling dipengaruhi politik, karena kecenderungan rezim Orde Baru menghapus jejak pendidikan era Sukarno. Sedangkan Kurikulum 1975 berdasarkan catatan Darmaningtyas (2004) menjadi kurikulum pertama orde baru yang menekankan indoktrinasi ideologi Pancasila untuk seluruh jenjang pendidikan.

Melalui indoktrinasi ini, pemerintah memperkenalkan konsep butir-butir Pancasila yang menjadi awal praktik pengajaran melalui sistem hapalan. Kemudian dilanjutkan dengan kurikulum 1984 melalui mata pelajaran Pendidikan Sejarah dan Perjuangan Bangsa (PSPB). Ide dasar di balik penerapannya mirip dengan doktrin Pancasila: siswa dituntut untuk menghafal kisah-kisah pahlawan nasional yang didominasi orang-orang bersenjata. Mata pelajaran ini tidak bertahan lama, karena dinilai tumpang tindih dengan pelajaran lain. Kurikulum 1994 adalah perpaduan antara kurikulum 1975 dan 1984 dimana periode ini sangat didominasi mata pelajaran eksakta dan mengkerdikan pelajaran seni. Kondisi diatas menegaskan bahwa dominasi negara atas pendidikan begitu kuat.

Pendidikan merupakan salah satu instrumen negara dalam membangun sumber daya manusia. Melalui pendidikan transformasi ilmu pengetahuan berlangsung. Cita-cita dan imajinasi yang diinginkan negara atas warganya termanifestasikan dalam kurikulum. Melalui sekolah, praktik

ideologisasi oleh negara berjalan. Teori ideologi menggaris bawahi konsep subjek dan ideologi (Althusser, 1971). Ideologi dalam pengertian Althusser selalu memerlukan subjek, dan subjek memerlukan ideologi. Ideologi dalam pandangan Althusser merupakan suatu alat untuk menciptakan manusia sebagai subjek kepentingan negara yang identik dengan alat intervensi bagi perjuangan kelas. Ideologi menginterpelasi individu sebagai subjek dan menempatkannya dalam posisi tertentu. Namun, di sisi lain, ideologi juga menempatkan hubungan antara individu dengan relasi sosialnya. Istilah ideologi dipahami sebagai seperangkat gagasan yang relatif lengkap tentang dunia dan masyarakat (pandangan dunia), yang dimiliki kelompok tertentu.

Melalui tulisan ini akan diurai bagaimana kuasa negara atas ideologi pendidikan di Indonesia ketika orde baru. Dengan menggunakan perspektif *Ideological State Apparatus (ISA)* akan diurai bagaimana proses ideologisasi itu berjalan dan melalui instrument apa saja. Selain orde baru, penulis juga akan mengurai bagaimana kondisi pasca orde baru dan sejauh apa perubahan yang terjadi.

Ideological State Apparatus (ISA)

Gagasan *Ideology and Ideological State Apparatus (ISA)* pertama kali di tulis pada tahun 1970. Karya Louis Althusser ini telah terbukti kontroversial dalam tradisi sosialis Internasional, serta seluruh pemikiran Marxis di seluruh dunia. Banyak gagasannya diilhami oleh pemberontakan masal pekerja dan mahasiswa tahun 1968. Sayangnya, sebagai anggota di Partai Komunis Prancis, Althusser tidak mendukung

pemberontakan/demonstrasi itu. Itulah yang akhirnya membuat para siswanya menentangnya. Meskipun ide-ide Altusser diminati dan dia mendapatkan reputasi sebagai tokoh opisisi yang radikal, dia ternyata tidak dapat berbuat di luar yang ditentukan birokrasi partai. Gagasan dalam buku yang berjudul *On the Reproduction of Capitalism: Ideology and Ideological State Apparatuses* menampilkan analisis bagaimana masyarakat tampak semakin liberal namun disaat yang sama kondisi politik mereproduksi dominasi melalui kekerasan/tindakan represif. Althusser menyebut bahwa negara juga memiliki apa yang ia namai sebagai *Ideological State Apparatus* (ISA).

Praktik ISA oleh negara berjalan secara masif dan difungsikan secara sekunder sebagai alat represi (penekanan) secara halus dan tak sadar, bahkan simbolik yang dijalankan melalui buku, dogma, hukum, pendidikan dan hal lain sejenis dan yang nantinya menjelaskan bahwa tidak ada hal yang murni di balik aparat ideologis tersebut. Artinya adalah ISA bekerja dalam mentalitas. ISA dapat dilihat sebagai berikut: (Althusser, 1971)

- a. ISA agama (sistem gereja-gereja yang berbeda)
- b. ISA pendidikan (sistem sekolah negeri dan swasta yang berbeda)
- c. ISA keluarga
- d. ISA hukum
- e. ISA politik
- f. ISA Serikat Buruh
- g. ISA Komunikasi (pers, radio dan televisi dll)
- h. ISA Budaya (sastra, seni, olahraga dll)

Salah satu aspek yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah terkait

pendidikan. Dalam konteks Indonesia, institusi pendidikan (sekolah) dapat diposisikan sebagai ruang diskursif negara dalam mengkonstruksi pemahaman warganya. Melalui institusi pendidikan, ISA bekerja dengan menggunakan hal-hal yang lebih halus, mental dan substansial (pengetahuan, spiritualitas, esensi kehidupan, kebangsaan, sejarah, dan sebagainya) sehingga itu selalu mempengaruhi dan mengendalikan mental subjek, terlebih terkait dengan janji-janji konsekuensi di balik itu semua.

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Shiraishi (1997) yang mengurai tentang pendidikan pada era orde baru, Soeharto berlaku sebagai Bapak tertinggi (*supreme Father*) Indonesia. Segala aspek berada dalam kontrol ketat pemerintah, termasuk pendidikan. Soeharto yang berasal dari Jawa banyak menempatkan dan memosisikan budaya Jawa sebagai sesuatu hal yang adiluhung. Orde baru yang sangat *Jawa-sentris* secara otomatis berimplikasi pada wacana pendidikan yang didominasi oleh Jawa sebagai entitas yang dominan. Ketika orde baru tumbang, ada upaya untuk keluar dari dominasi pendidikan yang sentralistik dan *Jawa-sentris*. Melalui tulisan ini akan digambarkan tentang bagaimana kuasa negara pada saat orde baru dan usaha untuk keluar dari model pendidikan tersebut. Melalui ISA akan didapatkan sebuah gambaran bagaimana proses itu berlangsung.

METODE PENELITIAN

Kajian dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan. Beberapa dokumen dan kajian terdahulu yang berkaitan dengan tema berusaha dihimpun dalam tulisan

ini. Kajian ini berfokus pada ideologi, negara dan pendidikan di Indonesia dengan menjadikan orde baru lokus kajiannya. Dokumen yang relevan dalam penelitian ini diidentifikasi secara kritis termasuk : Undang-Undang Dasar, artikel dan bab-bab lain yang terkait. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan mengidentifikasi jurnal, buku, makalah atau artikel dan atau informasi terkait yang relevan.

Adapun langkah-langkah yang diambil meliputi : Identifikasi umum dari sumber yang berkaitan, literatur yang relevan dan sumber lain yang saling menguatkan. Hal tersebut dilakukan untuk membantu memudahkan dalam menyusun narasi utuh yang diharapkan. Data ditafsirkan dan dianalisis secara deskriptif, prosesnya melibatkan kutipan dan pemrosesan data untuk memberikan tinjauan umum tentang cara kebijakan dibuat dengan maksud mengaitkan antara ideologi, kuasa negara dan pendidikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Orde Baru dan Ideologi Pembangunan dalam Pendidikan

Orde baru adalah era yang berorientasi kepada pembangunan sehingga semua aspek diarahkan pada hal tersebut, salah satunya adalah pendidikan. Sekolah-sekolah di Indonesia saat itu diharapkan berorientasi kepada pembangunan sehingga dapat menyiapkan tenaga kerja sesuai harapan pemerintah. Pembangunan yang digagas oleh negara diatur dalam sebuah program yang disebut Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Pelita I tahun 1969 dan

menghasilkan kurikulum baru di tahun 1975. Berdasarkan catatan Darmaningtyas (2004) dalam kurikulum 1975 menjadi kurikulum pertama Orde Baru yang menekankan indoktrinasi ideologi Pancasila untuk seluruh jenjang pendidikan. Melalui indoktrinasi ini, pemerintah memperkenalkan konsep butir-butir Pancasila yang menjadi awal praktik pengajaran melalui sistem hapalan.

Kusuma (2011) menyebutkan bahwa pendidikan Pancasila bagi orde baru memang sangat fundamental. Upaya pemerintah membudidayakan Pancasila sebagai ideologi bangsa mulai ditempuh dengan cara mewajibkan mata pelajaran khusus seperti Pendidikan Moral Pancasila (PMP) sejak penerapan Kurikulum 1975 di tahun ajaran 1976. Kurikulum indoktrinatif kembali diterapkan pada Kurikulum 1984 melalui mata pelajaran Pendidikan Sejarah dan Perjuangan Bangsa (PSPB). Ide dasar di balik penerapannya mirip dengan doktrin Pancasila: siswa dituntut untuk menghafal kisah-kisah pahlawan nasional yang didominasi orang-orang bersenjata. Mata pelajaran ini tidak bertahan lama, karena dinilai tumpang tindih dengan pelajaran lain. Pencetusnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nugroho Notosusanto (1983-1985), tutup usia pada 1985.

Melalui pendidikan kuasa negara beroperasi. Proses ideologisasi dalam pendidikan berjalan melalui beberapa instrumen. Salah satu yang paling nampak adalah melalui buku teks sekolah terbitan pemerintah. Dalam konteks *Ideological State Apparatuses* (ISA), buku sekolah adalah alat diskursif negara yang bekerja secara halus melalui mental sehingga dapat dipastikan akan

mempengaruhi dan mengendalikan subjek dalam institusi pendidikan.

Buku-buku sekolah terbitan pemerintah menjadi alat kontrol negara atas warganya ditegaskan Wirasti (2002) dalam penelitiannya tentang pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 1975-2001. Dalam penelitiannya dijelaskan beberapa hal terkait kuasa negara melalui buku teks untuk siswa. Beberapa buku untuk pelaku pendidikan, baik pendidik, peserta didik, administrator pendidikan bahkan orang tua peserta didik dalam kurun waktu 1972 sampai 1998 lebih banyak menjadi corong negara untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan politiknya. Dengan ciri ekspansi ekonomi dan represi politik. Orde baru membingkai sebuah fenomena secara komprehensif sehingga menghasilkan sebuah teks yang sangat indokrinatif. Beberapa bingkai tersebut adalah : bingkai ketertiban diperoleh dengan jargon demi pembangunan dan kepastian hukum. Sedangkan temuan yang lain, dominasi juga dilakukan melalui kontrol dalam sistem produksi dan konsumsi teks, yaitu dengan dibentuknya lembaga-lembaga pengawas, baik secara internal dalam sistem pendidikan maupun eksternal yang menyeluruh pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Secara internal, dengan adanya pusat pembukuan nasional yang berhak memonopoli sistem produksi teks pendidikan, sistem EBANAS yang sentralistik, ataupun sistem pengawasan pendidikan (supervisi pendidikan). Sedangkan secara eksternal terdapat sistem pengawasan produksi buku dan produk budaya lainnya, melalui : Kopkamtip, Bakorstanas, Kejaksaan dan lainnya. Penelitian tersebut berusaha menegaskan bahwa

pendidikan Indonesia salah satunya melalui buku pada era orde baru berada dalam kontrol yang ketat pemerintah.

Gambaran tentang kuasa orde baru atas pendidikan juga digambarkan oleh Shiraishi (1997) dalam bukunya. Dalam uraiannya dijelaskan bahwa buku teks sekolah dan buku-buku anak di Indonesia merupakan sarana yang cocok untuk mempelajari landasan ideologis suatu rezim dalam hakikatnya yang telanjang. Anak-anak tidak terlalu mengontrol apa yang dibacanya sampai mereka mengontrol apa yang dibacanya, sampai mereka membeli buku-buku pilihan sendiri dengan uang saku mereka sendiri. Buku-buku pelajaran di Indonesia dijamin jadi "*best-seller*" karena setiap murid wajib membeli dan membacanya setiap tahun. Sedangkan dalam hal yang lain, Shiraishi juga menjelaskan bagaimana dalam konteks identitas, Jawa terlihat sangat dominan. Gambaran diatas terlihat bagaimana buku dengan konstruksi wacana yang sangat *jawa-sentris* begitu dominan. Selain representasi Jawa yang dominan, dalam konteks relasi gender dalam konten buku teks juga terlihat bagaimana negara memberi gambaran tentang relasi ideal antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki diposisikan sangat dominan. Hal tersebut selaras dengan apa yang dijelaskan Suryakusuma (2011) bahwa ideologi negara orde baru juga dapat dinamakan Bapak-ibuisme di mana "bapak" sebagai sumber kekuatan primer kekuasaan dan "ibu" sebagai perantara kekuasaan tersebut. Dengan begitu, bapakisme memimpin kekuasaan formal, sementara ibuisme memimpin kekuasaan informal. Menurut Julia, dalam negara berideologi macam itu, perempuan didefinisikan tidak setara

dengan laki-laki: sebagai istri, ibu, atau keduanya.

Dalam penelitian yang lain, Hyeronimus (2017) menganalisis bagaimana dan mengapa wacana kolonialisme dipertahankan buku sejarah sekolah menengah pertama. Hasil penelitian ini menunjukkan agenda mempertahankan wacana kolonialisme adalah untuk memposisikan Eropa, khususnya Belanda berpengaruh positif pada banyak peristiwa sejarah di Indonesia. Misalnya, dalam buku itu digambarkan bagaimana Belanda berperan penting mengakhiri feodalisme bahkan secara tidak langsung telah membantu lahirnya kemerdekaan Indonesia. Dianalogikan dalam penelitian itu bahwa Belanda seperti telah membangun kuburannya sendiri karena jasanya yang besar pada pengembangan pendidikan di Indonesia. Pembahasan pada penelitian seolah menggiring opini pembaca pada kesimpulan bahwa buku sejarah tahun 1975-2013 memiliki andil besar untuk memproduksi dan mereproduksi wacana masyarakat Indonesia sebagai objek kolonial dan pergerakan nasional dilihat sebagai hasil yang tidak diinginkan (*unintended result*). Namun, tidak ada penjelasan komprehensif mengapa wacana terus dipertahankan meskipun masa orde baru telah berakhir.

Dari gambaran diatas diurai bagaimana kuasa negara atas pendidikan saat orde baru begitu kuat. Melalui buku teks sekolah dan kebijakan pendidikan negara mengatur banyak hal. Kuasa negara atas ideologi pendidikan dikontrol sedemikian ketat. Sehingga tergambar corak pendidikan Indonesia yang tidak jauh berbeda dengan corak kepemimpinan politik kala itu. Pendidikan orde baru tergambar begitu

sentralistik, jawa-sentris dan bias-gender. Sebuah kondisi yang tidak jauh dari semangat otoritarianisme. Ketika rezim otoriter Soeharto jatuh, atasnama reformasi ada upaya untuk keluar dari kuasa orde baru. Upaya keluar dari hal tersebut tentunya bukan hal yang mudah, sebagaimana tergambar dalam uraian selanjutnya.

Berusaha Keluar dari Bayang-bayang Orde Baru.

Perjalanan pendidikan Indonesia pasca orde baru adalah sebuah usaha untuk keluar dari sistem pendidikan yang telah disebut diatas. Pasca orde baru atau era reformasi adalah peluang untuk keluar dari hal tersebut. Akan tetapi upaya tersebut tidak sepenuhnya berhasil. Dalam penelitian Irawan (2014) menjelaskan dan mengkritisi bagaimana identitas nasional Indonesia ditampilkan pasca orde baru melalui buku teks Sekolah Dasar (SD) pasca orde baru. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa buku-buku SD kurikulum 2013 dalam hal konten sudah tidak lagi Jawa (jawa-sentris), bias gender dan seragam (sentralistik). Hal tersebut ditegaskan oleh Muhammad Nuh (Mendiknas 2009-2014) dalam keterangannya:

"Pada buku tersebut juga ada penokohan nama yang merepresentasikan daerah asal mereka. Mendikbud mencontohkan, nama Siti mewakili dari Jawa, Beni (Sumatera, Batak), Lina (Menado), Udin (Sunda, Jawa), Dayu (Bali), dan Edo (Papua). "Wajahnya beda-beda. Artinya, dari awal yang ingin kita bangun representasi dari Indonesia. Nama agama pun juga ada di sini," katanya.

Mendikbud menambahkan, *materi kesenian pun juga sudah ada di buku ini. Ada pelajaran 'ayo menyanyi', untuk materi kebersihan juga sudah diperkenalkan sikat gigi dan seterusnya. "Tempat ibadah pun juga kita perkenalkan semuanya, seperti masjid, gereja, pura, dan kelenteng. Tapi ini bukan pelajaran agama. Pelajaran agama ada tersendiri. Ini pelajaran non-agama,"*

Secara sekilas ada upaya untuk keluar dari dominasi orde baru, akan tetapi dalam penelitian tersebut juga mengkritisi bagaimana teks-teks yang dimunculkan dikatakan cenderung bias. Salah satu contohnya adalah bagaimana etnis Papua dihadirkan. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa Papua berhadapan dengan pelekatan stereotipe-stereotype yang justru memosisikannya sebagai liyan. Sedangkan contoh yang lain adalah dalam konteks gender. Perempuan mengalami fungsi ganda ketika ia tampil di area publik namun tetap saja tidak boleh terlepas dari area domestik. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa subordinasi atas etnis atau gender tertentu tetap saja berlangsung. Meskipun representasi etnis dan gender yang tidak ada dalam orde baru dihadirkan, akan tetapi dalam hal peran tetap saja mengalami subordinasi.

Apa yang terjadi dalam konteks Pendidikan Indonesia Indonesia juga terjadi di beberapa negara lain. Chu (2017) dalam penelitian dalam buku teks SD di China juga menjelaskan tentang bagaimana mana kelompok etnis minoritas terwakili secara visual, baik dalam visual manusia maupun

non-manusia, dalam beberapa buku teks ilmu sosial yang paling banyak digunakan di Cina. Terdapat 4159 visual dengan subyek manusia dikodekan dalam bentuk wilayah tempat tinggal (perkotaan atau pedesaan), gaya berpakaian, usia, aktivitas, jenis kelamin, dan interaksi dengan teknologi. Sementara itu, ada 1915 visual dengan subyek non-manusia yang ditemukan dalam bentuk lanskap dan artefak ciptaan manusia. Hasil dari kode-kode visual yang dianalisis menggunakan kode SPSS itu menunjukkan bahwa etnis minoritas masih sedikit terwakili dan sangat dibatasi. Sedikitnya hanya ada 2,40% dari total kode visual yang telah dianalisis mewakili mereka. Parahnya visualisasi itu justru terbatas. Misalnya, etnis minoritas lebih banyak divisualisasikan pada daerah desa, menggunakan pakaian adat tradisional, dan minim interaksi dengan teknologi bahkan cenderung gagap teknologi. Visualisasi tersebut justru memperkuat pandangan multikulturalisme yang konservatif dimana etnis minoritas dimarginalisasi dalam bingkai "tradisional dan tidak modern".

Melalui kurikulum 2013, bayang-bayang orde baru yang jawa-sentris terlihat seolah tidak digunakan lagi dalam praktik pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2013 seolah telah mengakomodasi multikulturalisme dilihat dari konsep kurikulum yang menghargai lokalitas lingkungan sekolah. Hal ini juga dinyatakan oleh Nora (2018) bahwa kurikulum 2013 memiliki karakteristik mengakomodir sekolah sebagai bagian dari komunitas sehingga penting untuk menggunakan komunitas di sekelilingnya sebagai sumber pembelajaran. Selain itu,

kurikulum ini memperhatikan keragaman individu siswa. Ini menunjukkan bahwa selain lokalitas, kurikulum 2013 juga menekankan individualitas siswa untuk diperhatikan. Namun, menurut Nora kurikulum ini gagal mengimplementasikan lokalitas sekolah sebagai sumber belajar dan hanya berfokus pada pengembangan dan pembentukan karakter individu siswa.

Upaya untuk keluar dari orde baru pada kurikulum 2013 menurut (Saripudin, Didin; Komalasari, 2016) terlihat lebih baik dari konten yang ada pada buku teks mata pelajaran Sejarah. Gambaran karakter tokoh sejarah sudah tidak terlihat lagi berpusat pada tokoh-tokoh sejarah yang berasal dari pulau Jawa saja. Misalnya, gambar dan penjelasan tentang Tan Malaka sebagai Komunis dari Sumatra sudah mulai diperlihatkan pada buku teks. Tidak hanya tokoh non-Jawa yang sudah mulai dimunculkan, kejadian sejarah yang berada di luar Jawa juga terdapat pada buku misalnya kejadian-kejadian perlawanan yang ada di Maluku, Aceh, serta daerah lainnya. Representasi perjuangan perempuan juga mulai muncul melalui pencitraan tokoh Kartini yang terkenal dengan gerakan emansipasinya. Kurniawan (2017) menyatakan bahwa etnis Tionghoa mulai dimunculkan pula untuk menyemai nilai multikulturalisme siswa. Kedua penelitian ini menguatkan bahwa kurikulum 2013 mulai terlepas dari bayang-bayang orde baru melalui representasi identitas yang sebelumnya tidak ada dalam kurikulum pendidikan orde baru, dari identitas etnis Tionghoa hingga gender. Akan tetapi, upaya memunculkan figur-figur tokoh non-Jawa masih minim dan

kurang menonjolkan peran mereka dalam perjuangan kemerdekaan. Peran Tan Malaka lebih dekat dicitrakan pada pemberontakan yang dilakukannya saat mulai ada perpecahan di Serikat Islam. Andai saja Jawa sentris memang benar-benar ditinggalkan, tokoh perempuan non-Jawa selain Kartini seharusnya tidak dilupakan. Selain itu, organisasi perempuan yang memiliki peran lebih besar seperti Gerwani ternyata tidak dimunculkan. Bayang-bayang Orde Baru masih terasa jelas pada kurikulum 2013 dalam caranya memandang buruk komunisme dan masih meminimalisir peran tokoh-tokoh non-Jawa.

SIMPULAN

Tiga puluh dua tahun adalah masa yang cukup lama dalam sebuah pemerintahan. Pendidikan Indonesia selama itu mengalami berbagai perubahan. Dalam tulisan ini bisa disimpulkan bahwa kuasa negara berjalan penuh atas arah pendidikan Indonesia. Praktek *Ideological State Apparatus (ISA)* dalam pendidikan tergambar secara jelas saat orde baru berkuasa melalui kebijakan pendidikan, buku sekolah dan hal-hal lain terkait. Dominasi warna politik rezim berkorelasi langsung dengan ideologi pendidikan. Dalam konteks etnis tergambar bahwa Jawa adalah suku dominan yang superior. Dalam hal gender, perempuan diposisikan tersub-ordinat dari laki-laki dan dalam konteks aturan pendidikan Indonesia diatur sangat sentralistik. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh ideologi yang dianut oleh negara.

Ketika orde baru jatuh, ada upaya untuk keluar dari dominasi pendidikan yang Jawa-sentris, bias gender dan

sentralistik tersebut. Melalui kurikulum 2013, keberagaman etnis, gender dan yang lain berusaha dimunculkan, akan tetapi pada secara substansial belum banyak beranjak dari cara pandang orde baru. Hal tersebut ditegaskan dengan adanya upaya menghadirkan etnis atau kelompok minoritas dalam sebuah buku teks sekolah yang dulu tidak pernah hadir di orde baru akan tetapi secara substansi atau peran dan relasinya tidak banyak bergeser dari kondisi sebelumnya. Relasi antar etnis dan gender tetap saja tidak setara dan cenderung mengeklusi komunitas yang dianggap minoritas. Hal tersebut menegaskan bahwa kondisinya tidak jauh beranjak dari orde baru.

DAFTAR PUSTAKA

- A, D. K. (2011). *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Gramedia.
- Althusser, L. (1971). "Ideology and Ideology State Apparatuses" dalam *Lenin and Philosophy and Other Essays*. Monthly Review Press.
- Chu, Y. (2017). Visualizing minority: Images of ethnic minority groups in Chinese elementary social studies textbooks. *The Journal of Social Studies Research*, 42(2), 135–147. <https://doi.org/doi.org/10.1016/j.jsr.2017.05.005>
- Darmaningtyas. (2004). *Pendidikan yang Memiskinkan*. Galang Press.
- Hyeronimus, P. (2017). The representation of colonial discourse in Indonesian secondary education history textbooks during and after the New Order (1975–2013). *Journal of the History of Education Society*, 47(3), 349–361. <https://doi.org/doi.org/10.1080/0046760X.2017.1384855>
- Irawan, B. (2014). *Menjadikan Indonesia: Politik Identitas Nasional dalam Buku Teks Sekolah Dasar*. Universitas Gadjah Mada.
- Kurniawan, H. (2017). THE Role of Chinese in Coming of Islam to Indonesia: Teaching Materials Development Based On Multiculturalism. *Paramita: Historical Studies Journal*, 27(2), 238–248. <https://doi.org/DOI:> <http://dx.doi.org/10.15294/paramita.v27i2.8660>
- Nora, Y. (2018). Learning of social studies in elementary school as a medium to strengthen multicultural education in the curriculum era 2013. *SHS Web of Conferences*, 42(00094), 1–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.1051/shsconf/20184200094>
- Saripudin, Didin; Komalasari, K. (2016). The Development of Multiculturalism Values in Indonesian History Textbook. *American Journal of Applied Science*, 13(6), 827–835. <https://doi.org/DOI:> [10.3844/ajassp.2016.827.835](https://doi.org/10.3844/ajassp.2016.827.835)
- Shiraishi, S. S. (1997). *Young Heroes: The Indonesian Family in Politics (1997)*. Southeast Asia Program Publications.
- Suryakusuma, J. (2011). *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*. Komunitas Bambu.
- Wirasti, M. K. (2002). *Wacana Ideologi Negara Dalam Pendidikan : Analisa Wacana Kritis terhadap Buku-Buku Teks Pendidikan untuk SD dan SLTP*. Universitas Indonesia.